

Graphical abstract



KOLABORASI PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

¹*Abd. Rahman, ²Hamdam, ³Mukhlis Hannan, dst.

¹Afiliasi Pertama, ²Afiliasi Kedua, ³Afiliasi Ketiga, dst.

*Corresponding author

1rahmanod8@gmail.com, 2hamdanunasman@gmail.com,

3mukhlisannan49@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the form and dynamics of collaboration between the government and the community in waste management in Polewali Mandar Regency. The problem of waste management is an important issue that requires a cross-actor approach so that it can be handled effectively and sustainably. Through a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with local government officials, community leaders, and waste bank managers and environmental communities. The results of the study indicate that collaboration between the government and the community occurs in various forms, including community involvement in environmental empowerment programs, provision of waste management facilities by the government, and strengthening regulations through regional regulations. The government acts as a regulator and service provider, while the community is involved as an implementer and driver at the grassroots level. The actor mapping technique using the Net Map method shows that this collaboration involves complex relationships with varying levels of influence between actors. The obstacles faced include limited budget, low public awareness, and weak cross-sector coordination. This study concludes that strong collaboration between the government and the community is very important in determining the success of waste management. Joint commitment, clear distribution of roles, and consistent policy support are needed to realize a sustainable waste management system at the local level.

Keywords: collaboration, government, community, waste management, Polewali Mandar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dinamika kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Masalah pengelolaan sampah menjadi isu penting yang memerlukan pendekatan lintas aktor agar penanganannya efektif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah tokoh masyarakat, serta pengelola bank sampah dan komunitas lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain pelibatan masyarakat dalam program pemberdayaan lingkungan, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah oleh pemerintah serta penguatan regulasi melalui peraturan daerah. Pemerintah berperan sebagai regulator dan penyedia layanan, sementara masyarakat terlibat sebagai pelaksana dan penggerak di tingkat akar rumput. Teknik pemetaan aktor melalui metode Net Map menunjukkan bahwa kolaborasi ini melibatkan hubungan kompleks dengan tingkat pengaruh yang bervariasi antarpelaku. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran rendahnya kesadaran masyarakat serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampah. Diperlukan komitmen bersama, distribusi peran yang jelas, serta dukungan kebijakan yang konsisten untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata Kunci: kolaborasi, pemerintah, masyarakat, pengelolaan sampah, Polewali Mandar

Article history

DOI: 10.35329/jp.v7i2.6287

Received : 2025-07-31 | Received in revised form : 2025-11-27 | Accepted : 2025-11-28

1. PENDAHULUAN

Sampah merupakan permasalahan lingkungan yang terus berkembang seiring dengan aktivitas manusia dalam sektor industri dan domestik. Produksi sampah yang tinggi berdampak pada lingkungan, kesehatan, serta estetika suatu wilayah apabila tidak dikelola secara tepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pendekatan pengelolaan yang konvensional perlu diubah menjadi sistem yang berkelanjutan dengan menekankan pada pengurangan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan. Hal ini menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. (Parepare et al., 2025a)

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat konsumsi masyarakat juga meningkat. Hal ini berdampak pada meningkatnya timbulan sampah di berbagai daerah, termasuk wilayah perkotaan. Data dari Badan Pusat Statistik (2018) menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 65 juta ton sampah setiap tahun dari total populasi sebanyak 261 juta jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa tanpa sistem pengelolaan yang terintegrasi, masalah sampah dapat menimbulkan krisis lingkungan yang serius dalam beberapa tahun ke depan. (Parepare et al., 2025d)

Permasalahan pengelolaan sampah di daerah perkotaan diperparah dengan keterbatasan infrastruktur pengelolaan seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta lemahnya sistem pemilahan dan pengangkutan sampah. Sebagian besar masyarakat juga belum memiliki kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga. Hal ini menyebabkan tercampurnya sampah organik dan anorganik, sehingga proses pengelolaan menjadi tidak efisien dan meningkatkan potensi pencemaran lingkungan. (Parepare et al., 2025c)

Model pengelolaan sampah yang masih banyak diterapkan di Indonesia adalah sistem kumpul-angkut-buang, yang sangat tergantung pada kapasitas dan lokasi TPA. Pendekatan ini sudah tidak relevan lagi dalam menghadapi peningkatan volume sampah. Terlebih lagi, sistem open dumping yang masih diterapkan di beberapa TPA memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Jika pola ini terus digunakan, banyak wilayah akan menghadapi kesulitan lahan untuk pembuangan dan resistensi dari masyarakat terhadap pembangunan TPA baru. (Hijab et al., 2025)

Alternatif pengelolaan yang lebih berkelanjutan seperti pengomposan, daur ulang, dan pembakaran ramah lingkungan menjadi solusi yang terus didorong. Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) pun menjadi landasan utama dalam kebijakan pengelolaan sampah modern. Sayangnya, implementasi prinsip 3R masih menemui kendala besar, terutama rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah secara mandiri. Edukasi lingkungan belum merata dan keterlibatan aktif masyarakat masih sangat terbatas. (Gilang et al., n.d.)

Di Kabupaten Polewali Mandar, permasalahan sampah menjadi isu strategis yang terus berkembang seiring pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Barat, yakni mencapai 490.029 jiwa pada pertengahan 2024, volume sampah yang dihasilkan setiap harinya sangat tinggi. Sampah berasal dari rumah tangga, pasar, fasilitas layanan kesehatan, sektor pendidikan, dan industri kecil-menengah. Variasi jenis sampah, terutama yang sulit terurai seperti plastik dan bahan berbahaya, memperparah kondisi lingkungan. (Polewali mandar et al., 2025b)

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menunjukkan komitmen dalam mengatasi permasalahan ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan sistem pengelolaan sampah yang lebih sistematis. Dalam peraturan tersebut, pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat diatur secara jelas, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. (Syakira, 2024)

Namun, di lapangan masih banyak tantangan yang dihadapi. Pelayanan pengangkutan sampah oleh pemerintah daerah masih terkonsentrasi di jalur utama kota, sedangkan daerah pinggiran belum sepenuhnya terlayani. Akibatnya, masyarakat di wilayah ini membuang sampah secara sembarangan, termasuk di sungai atau lahan kosong, yang kemudian berdampak pada pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa distribusi layanan masih belum merata. (Apriany, 2024)

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi aspek krusial yang menentukan keberhasilan pengelolaan sampah. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan kesadaran dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk berperan aktif melalui kelompok swadaya, komunitas peduli lingkungan, dan kegiatan edukasi berbasis RT/RW atau sekolah. (YUNITA, 2024)

Salah satu langkah konkret dalam penguatan kolaborasi ini adalah pendirian Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Paku, yang diresmikan pada 28 Mei 2024. TPST ini menjadi pusat pengelolaan sampah dari seluruh wilayah di Kabupaten Polewali Mandar. Kehadiran TPST membuka peluang bagi penerapan sistem pemilahan dan pengolahan sampah yang lebih efisien, serta mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam pengumpulan dan pengolahan sampah organik maupun anorganik secara mandiri. (Aulia Sahna Nurcahyanti et al., 2023)

Selain infrastruktur, keberhasilan pengelolaan sampah juga tergantung pada strategi komunikasi dan edukasi yang diterapkan pemerintah. Program sosialisasi yang menasar rumah tangga, pelajar, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat harus terus ditingkatkan. Edukasi yang tepat dapat membentuk kesadaran dan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, seperti

membiasakan pemilahan sampah sejak dari sumber, penggunaan ulang, dan pengurangan konsumsi barang sekali pakai. (Ekonomi et al., n.d.)

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pembentukan opini politik pemuda melalui media sosial TikTok di Desa Pangaparang, serta bagaimana potensi kolaborasi antara pemuda, pemerintah desa, dan komunitas digital dapat diperkuat untuk meningkatkan literasi politik melalui platform tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang cara pemuda menyikapi dan merespons konten politik yang tersebar di TikTok. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan, dengan fokus pada pemuda yang aktif menggunakan TikTok. (Hamdan et al., 2025)

Kearifan lokal merupakan bagian dari warisan budaya bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur dan identitas khas masyarakat. Salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar adalah perahu sandeq, yaitu perahu layar tradisional yang digunakan oleh nelayan pesisir untuk melaut. Pelestarian perahu sandeq bukan hanya upaya menjaga warisan budaya fisik semata, tetapi juga menjaga nilai-nilai sosial, sejarah, dan keterampilan turun-temurun masyarakat pesisir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. (Sunarti et al., n.d.)

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat serta dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai, pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Polewali Mandar bukanlah hal yang mustahil. Kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Untuk itu, perlu upaya berkelanjutan dalam membangun sinergi, memperkuat kapasitas lokal, serta mengembangkan inovasi pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik daerah dan budaya masyarakat setempat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap paling tepat untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual seperti partisipasi masyarakat dan strategi pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi ini dipilih secara purposive sengaja karena merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di provinsi tersebut, serta

menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, terutama di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Polewali, Wonomulyo, dan Binuang.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama, yaitu:

- Aparat pemerintah daerah yang terkait langsung dengan pengelolaan sampah, seperti Dinas Lingkungan Hidup, petugas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan pejabat kecamatan.
- Masyarakat setempat yang terdiri atas tokoh masyarakat, ketua RT/RW, serta warga yang aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, seperti bank sampah dan komunitas peduli sampah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

- Wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan terhadap informan kunci dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, praktik lapangan, dan bentuk kolaborasi yang terjadi.
- Observasi partisipatif, dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan pengelolaan sampah di lapangan, seperti proses pengumpulan, pemilahan, dan pengangkutan sampah di TPST atau di tingkat rumah tangga.
- Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder dari dokumen resmi seperti Peraturan Daerah, laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup, dan data statistik penduduk serta volume sampah.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikategorikan, disusun secara sistematis, lalu dianalisis untuk menemukan pola-pola kolaborasi serta hambatan dan potensi dalam pengelolaan sampah. Teknik ini mengikuti model analisis dari Miles dan Huberman (1994) yang berfokus pada proses pemaknaan terhadap data yang kompleks.

Tabel 1. Teknik Analisis Data

Tahapan Analisis	Deskripsi Kegiatan	Tujuan
Reduksi Data	Menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dianggap relevan dengan fokus penelitian.	Mengorganisir data agar lebih fokus pada isu kolaborasi dalam pengelolaan sampah.
Penyajian	Menyusun data yang	Memberikan

Data	telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, matriks tematik, atau tabel kategorisasi kolaborasi.	gambaran yang jelas dan terstruktur untuk mempermudah penarikan kesimpulan.
Penarikan Kesimpulan	Menafsirkan makna data yang telah disajikan, mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan terkait kolaborasi pemerintah dan masyarakat.	Menyimpulkan hasil penelitian secara valid dan menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian.
Verifikasi Data	Melakukan pengecekan ulang terhadap hasil analisis melalui triangulasi teknik dan sumber.	Menjamin keabsahan dan keandalan hasil analisis.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Polewali Mandar merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan jumlah penduduk mencapai 490.029 jiwa pada pertengahan tahun 2024, kabupaten ini mengalami peningkatan aktivitas ekonomi, sosial, dan pemukiman yang signifikan. Hal tersebut berdampak langsung pada meningkatnya produksi sampah harian, terutama di wilayah-wilayah perkotaan seperti Kecamatan Polewali, Binuang dan Wonomulyo. Perkembangan ini menuntut adanya sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Identifikasi Kolaborasi

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar teridentifikasi melalui sejumlah inisiatif yang bersifat partisipatif dan saling mendukung. Pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), berperan sebagai fasilitator utama dengan menyediakan regulasi, pendampingan teknis, serta sarana dan prasarana dasar seperti tempat penampungan sementara (TPS) dan kendaraan pengangkut sampah. Sementara itu, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam bentuk pembentukan bank sampah, kegiatan gotong royong, serta edukasi pemilahan sampah dari rumah tangga.

Penetapan Bidang Kolaborasi

Penetapan bidang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kebutuhan serta potensi wilayah. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup menetapkan beberapa bidang strategis untuk dijadikan

fokus kolaborasi, yaitu: pendidikan dan sosialisasi lingkungan, pengelolaan teknis sampah (TPS 3R dan bank sampah), serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis daur ulang. Bidang-bidang ini ditentukan dengan mempertimbangkan partisipasi aktif masyarakat, kapasitas kelembagaan lokal, serta efektivitas pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Kelurahan seperti Pekkabata, misalnya, dijadikan contoh lokasi kolaboratif karena memiliki struktur sosial yang cukup aktif dan kesadaran lingkungan yang terus tumbuh. Penetapan bidang kolaborasi ini juga memperkuat sinergi lintas sektor, di mana kelurahan, RT/RW, kelompok PKK, hingga karang taruna dapat berperan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Penetapan Struktur Lembaga Kolaborasi

Penetapan struktur lembaga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan untuk memastikan adanya kejelasan peran, tanggung jawab, dan alur koordinasi di lapangan. Struktur ini umumnya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi sosial serta kapasitas sumber daya manusia di masing-masing kelurahan. Di tingkat kelurahan seperti Pekkabata, struktur kolaboratif dibentuk melalui pembentukan tim kerja atau forum lingkungan yang melibatkan perangkat kelurahan, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, perwakilan PKK, karang taruna, dan pengelola bank sampah. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai fasilitator utama yang memberikan arahan teknis dan kebijakan, sementara kelurahan menjadi pelaksana kegiatan yang berinteraksi langsung dengan warga.

Menetapkan Pola Kebijakan

Penetapan pola kebijakan dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup menetapkan kebijakan yang mendorong pelibatan aktif masyarakat, seperti pengembangan program bank sampah, TPS 3R, dan kegiatan edukasi lingkungan di tingkat kelurahan. Kebijakan ini dirancang tidak bersifat top-down semata, melainkan mempertimbangkan aspirasi dan kapasitas masyarakat sebagai mitra utama.

Penetapan Modal Dan Mekanisme

Penetapan modal dan mekanisme dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan melalui dukungan pemerintah berupa sarana prasarana seperti tong sampah, gerobak angkut, dan bantuan pembentukan bank sampah. Sementara itu, masyarakat berkontribusi dalam bentuk tenaga, waktu, dan pengelolaan langsung di lapangan. Mekanisme kerja

sama diatur melalui koordinasi rutin antara kelurahan, RT/RW, dan kelompok masyarakat, serta adanya pembagian tugas yang jelas untuk menjaga konsistensi program.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar masih dalam tahap awal dan belum optimal. Meskipun secara regulasi telah tersedia payung hukum yang jelas, implementasinya masih terbatas pada aspek teknis pengangkutan sampah oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat belum menyentuh aspek pemilahan, pengolahan, dan pengurangan sampah dari sumber.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Brier & Jayanti (2020) yang menyatakan bahwa implementasi prinsip 3R di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya dukungan infrastruktur. Dalam konteks Polewali Mandar, pola “kumpul-angkut-buang” masih mendominasi dan belum bergeser ke sistem berbasis pengelolaan terpadu. Sistem open dumping juga masih ditemukan, meskipun pemerintah telah berupaya membangun TPST.

Kendala lain adalah kesenjangan pelayanan antara wilayah inti kota dan pinggiran. Hal ini menyebabkan masyarakat pinggiran kurang terlayani dan akhirnya membuang sampah secara tidak terkontrol. Diperlukan strategi desentralisasi layanan kebersihan agar akses terhadap pengelolaan sampah bisa lebih merata.

Partisipasi masyarakat yang rendah menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan edukasi lingkungan berkelanjutan. Program pelibatan warga seperti bank sampah, kompos skala rumah tangga, dan pelatihan pemilahan sampah perlu diperluas. Pemerintah perlu bersinergi dengan lembaga pendidikan, organisasi pemuda, dan tokoh masyarakat untuk membangun budaya peduli sampah sejak dini.

Secara keseluruhan, pengelolaan sampah yang efektif di Polewali Mandar memerlukan kerja sama yang lebih erat, berbasis kesetaraan peran antara pemerintah dan warga. Upaya teknis seperti TPST harus dibarengi dengan pendekatan sosial dan budaya agar terjadi perubahan perilaku. Dengan demikian, kolaborasi dalam pengelolaan sampah dapat berkembang dari sekadar peran fungsional menjadi kolaborasi yang bersifat transformatif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa lima

langkah strategis identifikasi kelompok, penetapan bidang kolaborasi, pembentukan struktur lembaga, perumusan kebijakan, serta penyediaan modal dan mekanisme merupakan fondasi penting dalam membangun kerja sama yang efektif, terarah, dan berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan. Identifikasi kelompok aktor memungkinkan pemetaan peran dan potensi masing-masing pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, hingga lembaga pendidikan. Penetapan bidang kolaborasi membantu memfokuskan energi pada isu-isu prioritas seperti pemilahan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, serta pengembangan fasilitas pengolahan sampah. Selanjutnya, struktur kelembagaan yang jelas memberikan arah koordinasi, sedangkan kebijakan yang partisipatif menciptakan landasan hukum dan dukungan moral yang kuat bagi inisiatif lokal. Terakhir, penyediaan modal dan mekanisme memastikan keberlangsungan program secara teknis dan finansial. Jika kelima langkah ini dilaksanakan secara konsisten dan disesuaikan dengan karakteristik sosial-ekonomi dan geografis wilayah Polewali Mandar, maka kolaborasi pengelolaan sampah dapat melahirkan solusi yang inovatif, partisipatif, dan berdampak nyata dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriany, M. (2024). *Di Kabupaten Polewali Mandar= Collaborative Dynamics In The Management Of The Sipamandaq Main Waste Bank Of Polewali Mandar* .
- Aulia Sahna Nurcahyanti, E., Soesiantoro, A., & Maulana Ilman, G. (2023). *Usaha Milik Desa Ngerong” Sejahtera” Menggunakan Pendekatan Collaborative Governance (Studi Pada Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten*
- Ekonomi, J., Ekonomi Islam Padliani, P., Suwandi, M., & Nur Saidi, E. (n.d.). *Masyarakat Dalam Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah di Desa Sabang Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)*. *journal3.uin-alauddin.ac.id*. Diambil 26 Juni 2025, dari .
- Gilang, R. N., Dzunuwanus, G., Manar, S., & Ip, M. S. (n.d.). *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang*.
- Hamdan, H., Masyhadiah, M., & Ilham, I. (2025). *Pembentukan Opini Politik Pemuda Melalui Media Sosial Tiktok Di Desa Pangaparang*.
- Hijab, M., Rahmawati, R., Suarman Sudarsa, A., & Author, C. (2025). *Fasilitatif Camat dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat melalui Tata Kelola Inovasi dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor*.
- Parepare, A. K., Sulawesi, P., Program, S., Keamanan, S.

M., Publik, K., Skripsi, P., Lalu, D. H., & Murdhani, A. (2025a). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.*

Parepare, A. K., Sulawesi, P., Program, S., Keamanan, S. M., Publik, K., Skripsi, P., Lalu, D. H., & Murdhani, A. (2025b). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Jembrana Kedas Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.*

Parepare, A. K., Sulawesi, P., Program, S., Keamanan, S. M., Publik, K., Skripsi, P., Lalu, D. H., & Murdhani, A. (2025c). *Kolaborasi Multi-Stakeholder Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.*

Parepare, A. K., Sulawesi, P., Program, S., Keamanan, S. M., Publik, K., Skripsi, P., Lalu, D. H., & Murdhani, A. (2025d). *Model Collaborative Governance Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.*

Sunarti, S., Rustan, I., Pegguruang, M. H.-J., & 2025, undefined. (n.d.). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Dalam Program Pelestarian Perahu Sandeq.

SYAKIRA, A. A. (2024). *Timbulan Sampah Melalui Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.*

YUNITA, Y. (2024). *Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.*